

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Agus dan Richad. 2024. Hukum Agraria Indonesia (Sejarah dan Perkembangan), Jakarta, CV Cendikia Press.
- Ahmad, Teuku. Dkk. 2023. Politik Hukum Penanggulangan Wabah (Covid-19) di Indonesia, Aceh, Syiah Kuala University Press.
- Aries Dian dan Nurasa Akur. 2020. Tuntunan Pembuatan Akta Tanah, Yogyakarta, STPN Press.
- Baho, Dayen. 2023. Dinamika Fungsi Sosial Hak Atas Tanah, Sulawesi Selatan, CV Ruang Tentor.
- Burhanuddin. 2022. Tanggungjawab Notaris Perlindungan Minuta Akta Dengan Cyber Notary, Sumatera Barat, CV Azka Pustaka.
- Diana, Umami, dan Farid. 2020. Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jakarta, Sinar Grafika.
- Djaja, Benny. dkk. 2023. Anotasi Putusan Pengadilan Bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jilid I, Jakarta, Damara Press.
- Febrianty Yenny. 2023. Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia, Jawa Barat, CV. Green Publisher Indonesia.
- Frieda, Tohandi, dan Dwi, 2020. Hukum Pendaftaran Tanah, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Hadriani. 2024. Bunga Rampai Metodologi Penelitian, Jawa Tengah, , PT. Media Pustaka Indo.
- HS Salim, 2019. Uji Kompetensi Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Jalaludin Iman, dkk. 2023. Metodologi Penelitian Hukum, Banten, PT Sada Kurnia Pustaka.
- Jayus, dan Agus Wijaya. 2022. Kewenangan Membangun Konektivitas Transportasi, Surabaya, CV. Jakad media Publishing.
- Krismen, Yudi. 2021. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Depok, PT Rajagrafindo Persada.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum, Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press.

- Moechthar, Oemar. 2024. Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT, Jakarta, Kencana.
- Palenewa, Yoseph James, 2024. Hak-Hak Atas Tanah dan Kekayaan Alam, Bandung, Widina Media Utama.
- Pugung Solahudin, 2021. Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum, Sleman, Deepublish.
- Prasetyorini, Adi Sinto. 2024. Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum, Semarang, CV Lawwanam
- Rachmad, Fajar. 2021, Diskrepansi Asas Peradilan, Surabaya, CV. Jakad Media Publishing.
- Samsaimun, 2019. Peraturan Jabatan PPAT Pengantar Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia, Bandung, Pustaka Reka Cipta.
- Sarie, Fatma, dkk. 2023. Metodologi Penelitian, Batam, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Sihombing, B.F. 2021. Konversi Hak Atas Tanah Barat Edisi Pertama, Jakarta, Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2019. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Sudarsono dan Efendi A'an. 2025. Pilar-Pilar Hukum Administrasi, Jakarta, Kencana.
- Supeno. 2019. Dasar-Dasar Hukum Perikatan Hukum Perjanjian Pada Umumnya, Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Internasional, dan Perjanjian Dalam Hukum Islam, Jambi, Salim Media Indonesia.
- Wayan I dan Sapto Sigit. 2022. Pokok-Pokok Hukum Agraria Indonesia, Jawa Tengah, Lakeisha.
- Tiyas, Evy, dan Laela. 2023. Regulasi dan Pelaksanaan Penerbitan Sertipikat Pengganti Karena Rusak, Jawa Tengah, PT Nasya Expanding Management.
- Tumurang, Marjes. 2024. Metodologi Penelitian, Jawa Tengah, PT Media Pustaka Indo.
- Triansyah, Agus Fadli, dkk. 2023. Memahami Metodologi Penelitian, Batam, Yayasan Cendikia Mulia.

Utomo, Wahyu Isnaini Hatta, 2020. Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Edisi Pertama, Jakarta, Kencana.

Zakariah, Vivi, dan Askari, 2020. Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development, Sulawesi, Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

B. Jurnal, Artikel dan Tesis

Adlina Amalina Nisa, 2023. *Pemeriksaan Setemoat (Descente) Sebagai Pengetahuan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Perdata*, Jurnal Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Vol.11, No.2.

Adityo, Ichfan Hanry, 2024, "Kriteria Pembeli Beritikad Baik dalam Jual Beli Tanah", Artikel Hukum Online.com.

Admin, Juni 2022. Pengertian Eigendom dan Konversinya. Artikel Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Admin, Februari 2025, "Apa itu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)", Artikel Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Ana, Yusriyadi, dan Mira, 2022. *Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.3.

Ari Made Ni dan Gunartha Putu I, 2019. *Kedudukan Notaris Sebagai Membuat Akta Dalam Bidang Pertanahan*, Jurnal Kertha Negara Universitas Udayana, Vol.7, No.11

Aziz Pahrudin, dkk. 2024. *Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa : Litigasi dan Non-Litigasi*, Jurnal Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.2

Baranyanan Djaiz Soeleman, 2024. *Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang*, Jurnal CAPITAN Constitutional Law & Administrative Law Review, Vol.2, No.1.

Beatrix Gloria, 2021, "Perbedaan Akta Otentik dan Akta Di Bawah Tangan", Artikel Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Katolik.

Dhoni, Abdul, dan Mira, 2021. *Tanggung Jawab Direksi Atas Pelanggaran Fiduciaryduty Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol.8, No.6.

- Endrianto dan Iwan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Hak Eigendom Yang dikuasai Oleh Pemerintah Dengan Sertipikat Hak Pakai*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol.7, No.2, 2024.
- Febriani, Nathania, 2020. *Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah Dengan Hak Eigendom Yang Tidak Dikonversi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 756K/Pdt/2019)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.3, No.2.
- Hansun, Hendro Morrets, 2019. *Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah*, Jurnal Lex Administratum, Vol.4, No.1
- Herts dan Kristiane, 2022. *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Jurnal Lex Privantum, Vol.10, No.3.
- Inge, Palmawati, dan Rizkinil, Juni 2023. *Tanggungjawab Pelaku Usaha dan Marketplace terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-commerce*, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3, No.1.
- IS, Resa, 2025, “Akta Jual Beli Tanah (AJB) Palsu : Sanksi Hukum?”, Artikel ILS Law Firm
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Limbong, Susanto Feri, 2023. *Penyebab Terjadinya Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan KUHP dan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jurnal Universitas Dharmawangsa, Vol.17, No.2
- Lubis Sukarni Ahmad, 2024. *Tanggung Jawab Hukum Dalam Kontrak Kerjasama Pengadaan Beras Antara Perum Bulog Kantor Cabang Medan Dengan CV.Agromas Persada Tahun 2023 [Tesis]*. Medan. Universitas Medan Aera.
- Mualif, 2025, “Jenis-jenis Status Sosial”, Artikel Universitas Islam An Nur Lampung.
- Murry dan Novia, 2022. *Langkah Hukum Terhadap Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Atas Hak Sertipikat Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 181/B/2020/PT.TUN.SBY)*, Jurnal Judiciary, Vol.11, No.1.
- Mutriadi Anton, 2022. *Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan*, Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, Vol.5, No.2.
- Novyta, Adonia, dan Suryani, 2021. *Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Batulis Civil Law Review, Vol.2, No.1.
- Ngurah Agung Anak dan Ega Putu Ni, 2020. *Akibat Hukum Atas Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Pelaksana Tugas Sementara Dalam Menjalankan Tugasnya Selaku Kepala Daerah*, Jurnal Universitas Udayana.

- Ningtyas Ayu Catur Dina, 2023. *Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Didasari UUPA*, Court Rewview: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.3, No.1.
- Pamungkas Catur Slamet, 2021. *Transformasi UU Agraria Tahun 1870 ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia*, Al-Isnad : Journal of Islamic Civilization History and Humanities, Vol.2, No.2.
- Pompana, Wilson, 2025, “Mengetahui Fungsi PPJB dalam Proses Jual Beli Tanah”, Artikel Hukum Online.com.
- Putu Luh, Ida, dan Made, 2021. *Kekuatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Jual Beli Tanah Kavling*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2, No.3.
- Pranoto, Sudewo Rodeo, 2021. *Implikasi Nilai Hak Tanggungan di dalam Pemberian Hak Tanggungan*, Jurnal Education and development, Vol.9, No.2.
- Siagin, Wahyuni Sri, 2022. *Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Syarat Kepemilikan Tanah Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*, Jurnal Notarius UMSU, Vol.1, No.2.
- Simanis, 2024, “Pengertian Sengketa : Jenis, Penyebab, Tahapan, Cara Penyelesaian, dan Contoh Sengketa”, Artikel.
- Sudiro, Ahmad dan Apriandini Dian, 2023. *Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas yang Belum Mendapatkan Pemecahan Sertipikat dari Developer yang Dipailitkan*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol.12, No.1.
- Suherman Riski. 2022. Analisis Yuridis Terhadap kedudukan PPAT Dalam Sengketa Jual Beli Tanah di Bengkulu (Study Putusan No.11/Pdt/2019/PT.BGL) [Tesis] . Bengkulu. Universitas Islam Sultan.
- Suhaini Ani dan Huda Miftahul, 2024. *Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah Terhadap Pelanggaran Etika yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Bertugas Dalam Pembuatan Akta Tanah*, Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, Vol.5, No.2.
- Sutanto, Pedro, 2022. *Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Bekas Eigendom Verponding Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah*, Jurnal Dialektika Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol.4, No.2.
- Tamsil dan Ratih, 2021. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No.474/Pdt.G/2017/Pn.Sby Tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Dengan Klausul Kuasa Menjual*, Jurnal Universitas Negeri Surabaya.

Veriena dan Lidia, 2021. *Sengketa Hukum Penggunaan Non Navigasi Jalur Air Internasional Antar Negara Perbatasan*, Jurnal Tatohi : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.9.

Wahjuningati, Edy dan Azizah Nurlaili, 2024. *Problematika Peralihan Hak Atas Tanah Dasar Jual Beli Di bawah Tangan Pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1194 di Kelurahan Sidoserma Kota Surabaya*, Jurnal Judiciary Hukum dan Keadilan, Vol.13, No.1

Wahyuni Willa, 2023, “Perbedaan Akta Notaris, Legalisasi dan Waarmeking”, Artikel Hukum Online.com.

Widyarini dan Edralin, 2023. *Kepemilikan Pemegang Hak Atas Tanah Bekas Eigendom Verponding Setelah Konversi Undang-Undang Pokok Agraria*, Jurnal Notary Law Research, Vol.5, No.1.

Wijaya, Winters Michael, 2021, “Kedudukan Eigendom Verponding yang dikuasai Warga Negara Indonesia Asli”, Artikel Hukum Online.com.

Zulkifli Akhmad, 2019. *The Legal Analyzes The Concept Of The Right To Control The State Of Natural Resources At Sea In The Jurisdiction Of Indonesia*, Jurnal Hukum Belom Bahadat, Vo.9, No.2.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

